



# PUSAT DATA DAN INFORMASI



# LAPORAN KINERJA 2023



# PUSAT DATA DAN INFORMASI



# LAPORAN KINERJA 2023

# PENGANTAR

Pusat Data dan Informasi memiliki tiga target kinerja kegiatan sesuai mandat yang tertuang di dalam perjanjian kinerja tahun 2023, yaitu data dan informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan cakupan dari hasil-hasil pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2022 serta penetapan kinerja para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bidang di Lingkup Pusat Data dan Informasi Tahun 2023.

Dengan kolaborasi melalui banyak pihak dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, Pusat Data dan Informasi telah berhasil melaksanakan dan menyelesaikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dengan persentase capaian penyelesaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sejumlah 99,96%. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari inovasi yang dilakukan baik dari hal perencanaan penganggaran sampai dengan metode teknis kegiatan, melalui pendekatan KOLABORAKSI (Komitmen Layanan, Berorientasi Aksi)

Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini, Pusat Data dan Informasi berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak khususnya yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi maupun proses perencanaan yang akan datang sehingga dapat tersusun dengan baik dan berhasil guna.

Jakarta, 31 Desember 2023  
Kepala Pusat Data dan Informasi,



Dr. Edi Sulisty H. Susetyo, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19701206 200003 1 004



# **KOLA BOR AKSI**

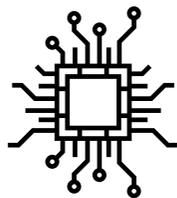
**Komitmen Layanan  
Berorientasi Aksi**



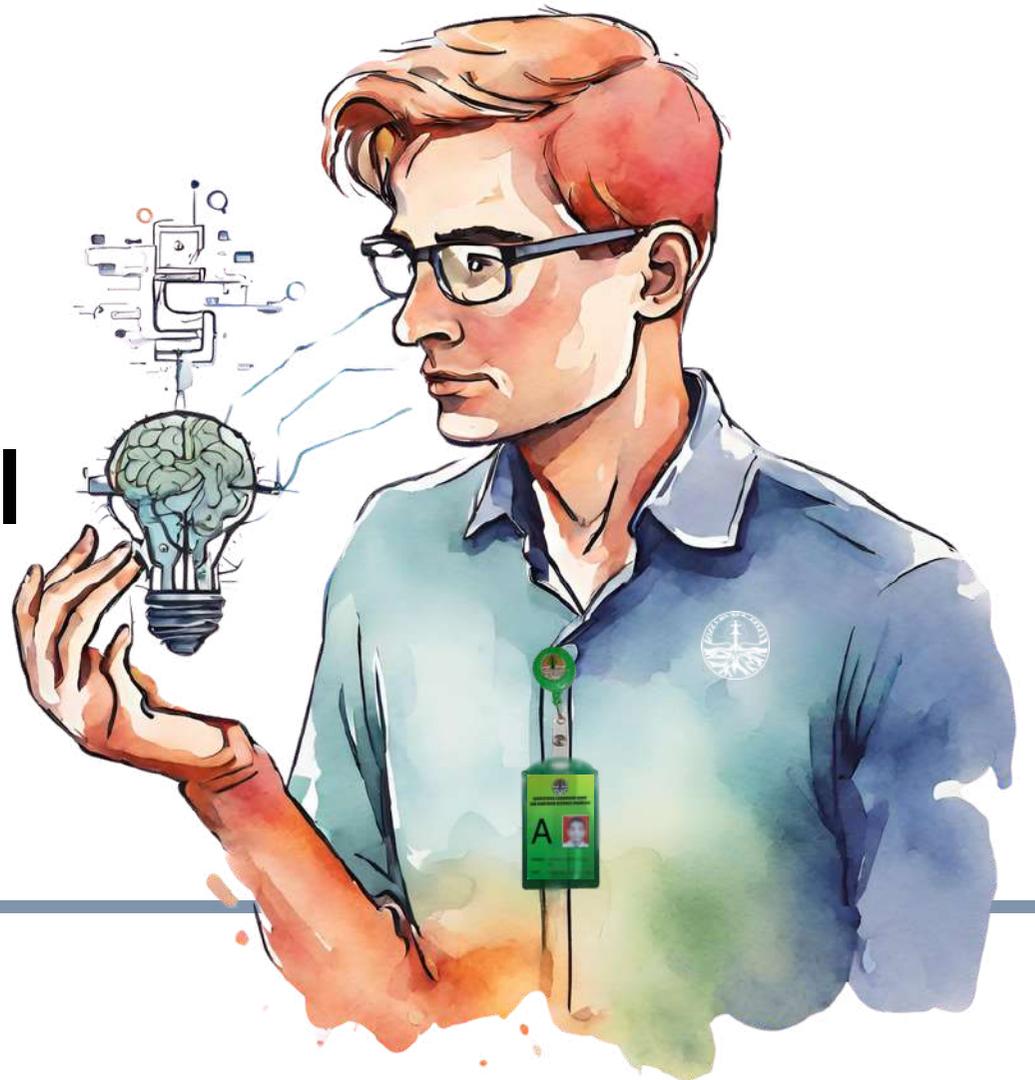
**DATA**



**INFORMASI**



**TEKNOLOGI**



# LAPORAN KINERJA 2023

Pusat Data dan Informasi  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

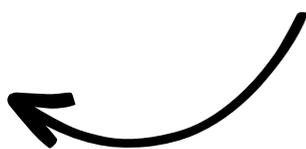
---

Pusat Data dan Informasi mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja 2023 ini :

Disusun oleh:

Edi Sulisty H. Susetyo, Firman Maulana, Ruhyat Hardansyah,  
Lenny Juanita Sari, Agung Wicaksana, Siti Jahidah Fina, Dhea  
Rizky Hutami, Syafira Nur Hasanah, Deni Prasetyo, Andry  
Januwardy, Phury Agathis.

Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan:



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**KOLA  
BOR  
AKSI  
-PUSDATIN-**

# DAFTAR ISI



- 01** Ringkasan Eksekutif
- 02** Ringkasan Capaian Kinerja
- 03** Pendahuluan
- 04** Perencanaan Kinerja
- 05** Akuntabilitas Kinerja

# RINGKASAN EKSEKUTIF

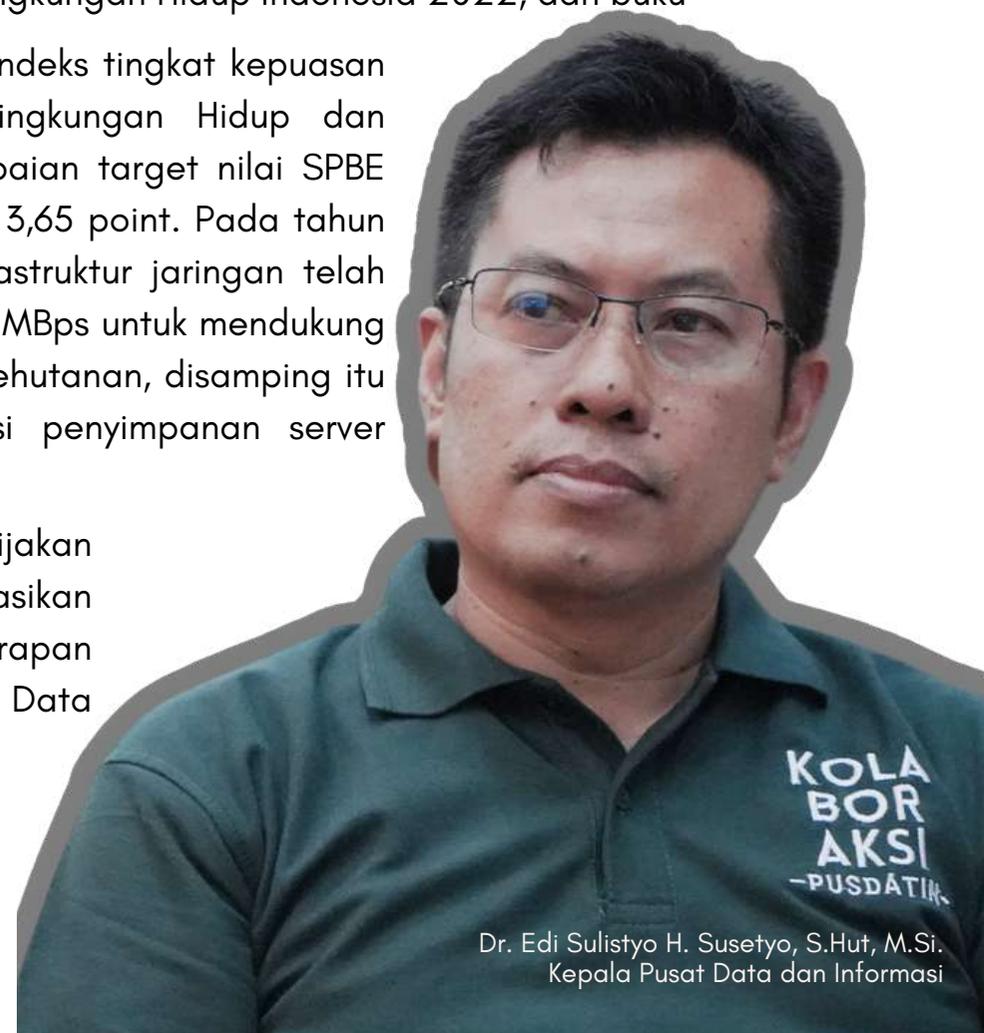
Target kinerja kegiatan Pusat Data dan Informasi disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023. Perjanjian kinerja dimaksud merupakan sebuah kontrak kesanggupan unit kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Inovasi dilakukan baik dari hal perencanaan penganggaran sampai dengan metode teknis kegiatan yang dilakukan, dengan pendekatan KOLABORAKSI (Komitmen Layanan, Berorientasi Aksi) yang difokuskan tiga indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu: Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/SPBE.

Secara ringkas pencapaian dari indikator kegiatan penyelenggaraan data dan informasi KLHK dengan sasaran kegiatan meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian, maka dijabarkan sebagai berikut : Satu, penyusunan dokumen data dan informasi sebanyak 3 dokumen dimana telah dapat disusun buku Statistik, buku Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022, dan buku

Status Hutan dan Kehutanan 2022. Dua, target nilai indeks tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai 4 point tercapai 100%. Tiga, pencapaian target nilai SPBE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejumlah 3,65 point. Pada tahun 2023 Pusat Data dan Informasi sebagai pengelola infrastruktur jaringan telah menjamin ketersediaan bandwidth internet sebesar 1700 MBps untuk mendukung pekerjaan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disamping itu Pusdatin memiliki ruangan khusus untuk memfasilitasi penyimpanan server dengan kapasitas 23 Rak Server.

Selain kinerja di tahun 2023, dengan menerapkan kebijakan Money follows program memastikan anggaran dialokasikan berdasar pada kebermanfaatan kegiatan sehingga serapan anggaran Pusat data dan Informasi mencapai 99,96% Data dan Informasi melakukan efisiensi.



# RINGKASAN CAPAIAN KINERJA 2023

Pusat Data dan Informasi

# 100%

Capaian Kinerja



- 100% Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 100% Data dan Informasi KLHK
- 100% Pengelolaan Website
- 100% Pengelolaan Infrastruktur Jaringan
- 100% Pengembangan Aplikasi
- 100% Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK

# PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Data dan Informasi merupakan unit organisasi di bawah Menteri yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

2. Pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

3. Bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pemerintah berbasis elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan

5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan administrasi pusat.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi diatas maka tantangan pusat data dan informasi adalah menyediakan layanan data data informasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan, layanan data dan informasi ke masyarakat, serta layanan teknologi informasi kepada unit-unit dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai bentuk akuntabilitas maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai petanggungjawaban kinerja yang telah ditandatangani.

Dalam menjalankan tugasnya, struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi membawahi tiga bidang yaitu: Bidang Pengelolaan Data, Bidang Pengelolaan Informasi dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi yang didukung oleh Sub bidang teknis dan Subbagian tata usaha.

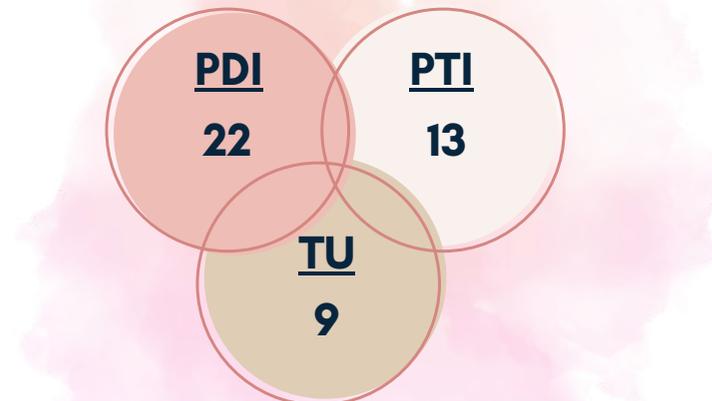


**D**alam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting Pusat Data dan Informasi. Pada pelaksanaannya, dalam menjalankan tugas-tugas yang dimiliki, Pusat Data dan Informasi ditunjang oleh keberadaan SDM yang memadai. Ketersediaan SDM yang profesional dan berintegritas yang ditunjukkan dengan aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang handal dalam kalkulasi kuantitas dan kalkulasi yang ideal sesuai kebutuhan organisasi akan mampu menjadi faktor utama dalam mewujudkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

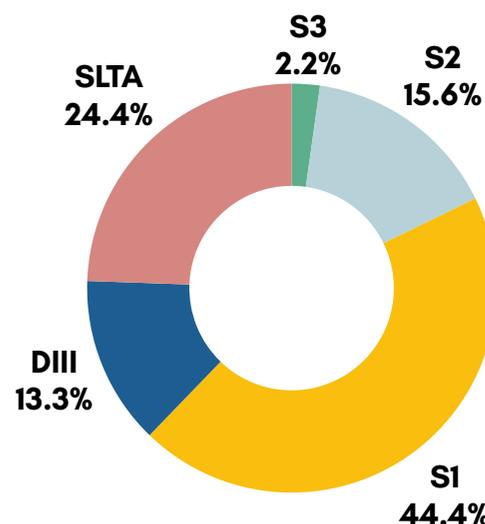
Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pusat Data dan Informasi terdiri dari ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah total SDM yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi di tahun 2023 yaitu sebanyak 45 pegawai, dengan komposisi terdiri atas 35 PNS, 3 PPPK dan 7 PPNPN. Selain itu di tahun tersebut juga terdapat 2 pegawai yang purna tugas.



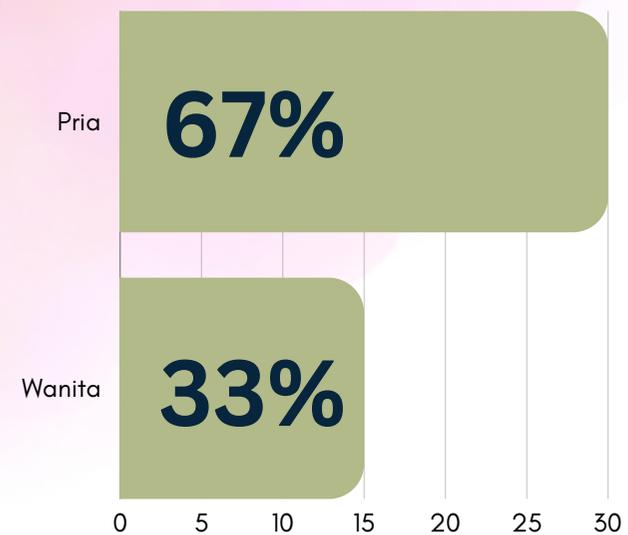
Jumlah total pegawai terbagi atas dua Bidang diantaranya Bidang Pengelolaan Data dan Informasi dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi serta Sub Bagian Tata Usaha. Pada Bidang Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) sebanyak 22 pegawai, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi (PTI) sebanyak 13 pegawai dan Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 9 pegawai.



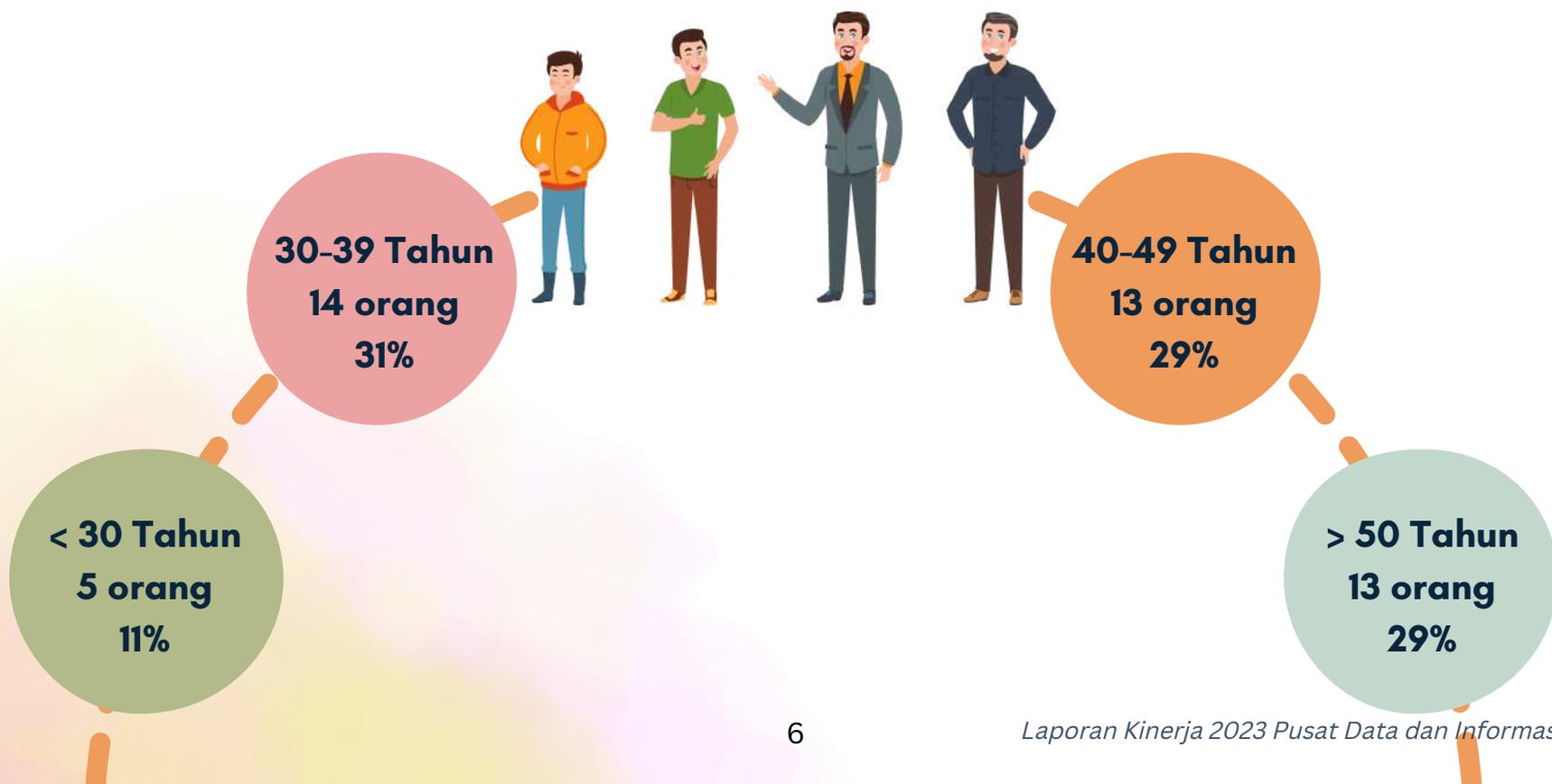
Pengelompokan pegawai berdasarkan riwayat pendidikan di Pusat Data dan Informasi terbagi atas berbagai jenjang mulai dari SLTA hingga Program Doktoral (S-3) yang didominasi oleh pegawai bergelar Sarjana (S-1) sejumlah 20 orang. Selanjutnya diikuti oleh pegawai lulusan SLTA sebanyak 11 orang, pegawai lulusan Diploma III sebanyak 6 orang, pegawai lulusan Pascasarjana (S-2) sebanyak 7 orang dan lulusan Program Doktoral (S-3) sebanyak 1 orang.



Berdasarkan sebaran jenis kelamin pegawai di Pusat Data dan Informasi, baik pegawai yang berstatus ASN maupun PPNP didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Total pegawai laki-laki di Pusat Data dan Informasi sejumlah 30 pegawai atau sebesar 67% sedangkan pegawai perempuan sejumlah 15 pegawai atau sebesar 33%.



Pesebaran pegawai Pusat Data dan Informasi menurut usia dapat terlihat pada grafik dibawah. Terlihat usia dibawah 30 tahun berjumlah 5 orang (11%), usia sekitar 30-39 tahun berjumlah 14 orang (31%), usia sekitar 40-49 tahun berjumlah 13 orang (29%) dan usia diatas 50 tahun berjumlah 13 orang (29%). Merujuk pada data-data SDM berdasarkan status, riwayat pendidikan, golongan serta kelompok usia yang bersumber dari aplikasi SIMPEG KLHK, dapat dilihat bahwa Pusat Data dan Informasi didominasi oleh generasi muda produktif yang diharapkan mampu dalam kemajuan teknologi, memiliki semangat dan kreatifitas dalam mencapai kinerja yang maksimal.



# PERENCANAAN KINERJA

**B**erdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, Pusat Data dan Informasi berkewajiban menyediakan layanan data informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan, layanan data dan informasi yang dapat diakses masyarakat, serta layanan teknologi informasi kepada unit-unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

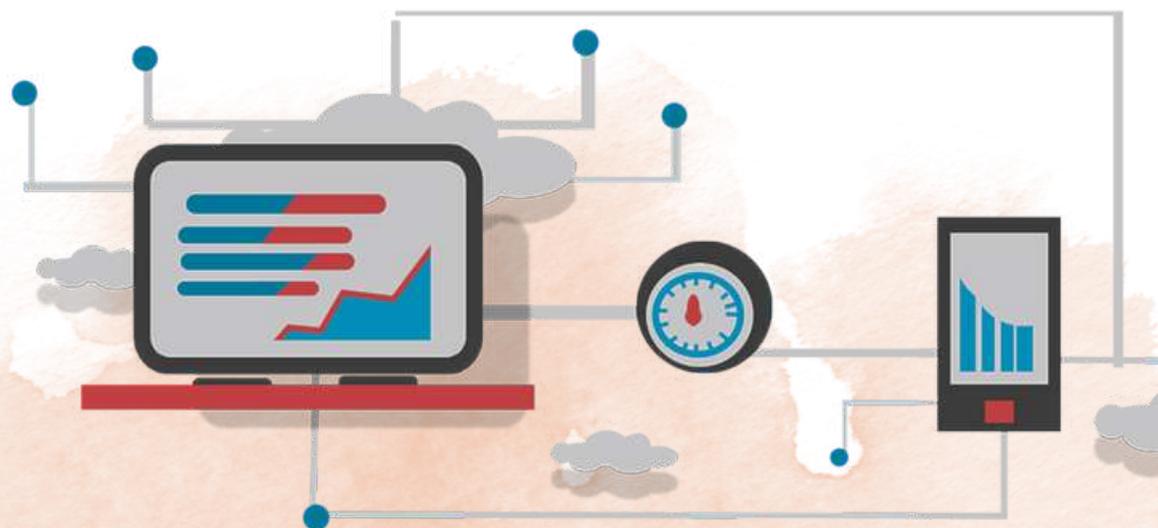
Terdapat dua sasaran kegiatan Pusat Data dan Informasi yaitu termanfaatkannya informasi kualitas lingkungan hidup untuk pengukuran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengambilan kebijakan dan tercapainya layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK. Selanjutnya dari dua sasaran tersebut dijabarkan dalam tiga indikator kinerja Pusat Data dan Informasi beserta target capaian kinerja tahun 2023.



 **Data dan Informasi KLHK (Statistik, SLHI, Status Hutan)**

 **Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK**

 **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**



Terdapat dua sasaran kegiatan Pusat Data dan Informasi yaitu: 1). Termanfaatkannya informasi kualitas lingkungan hidup untuk pengukuran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pengambilan kebijakan; 2). Tercapainya layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK. Selanjutnya dari dua sasaran tersebut dijabarkan dalam 4 Indikator kinerja Pusat Data dan Informasi beserta target capaian kinerja tahun 2023. Alokasi anggaran untuk pencapaian target kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2023 sejumlah Rp. 20.584.429.000,-

Suporting Kegiatan Penanaman, Pulogadung





SLO-MO

VIDEO

PHOTO

SQUARE

PANO



# AKUNTABILITAS KINERJA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi, dalam rangka pertanggungjawaban dan oeningkatan kinerja instansi pemerintah.

Maka untuk mewujudkannya, Pusat Data dan Informasi KemenLHK melaporkan akuntabilitas kinerja pada tahun 2023.

## A. Data dan Informasi

### Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

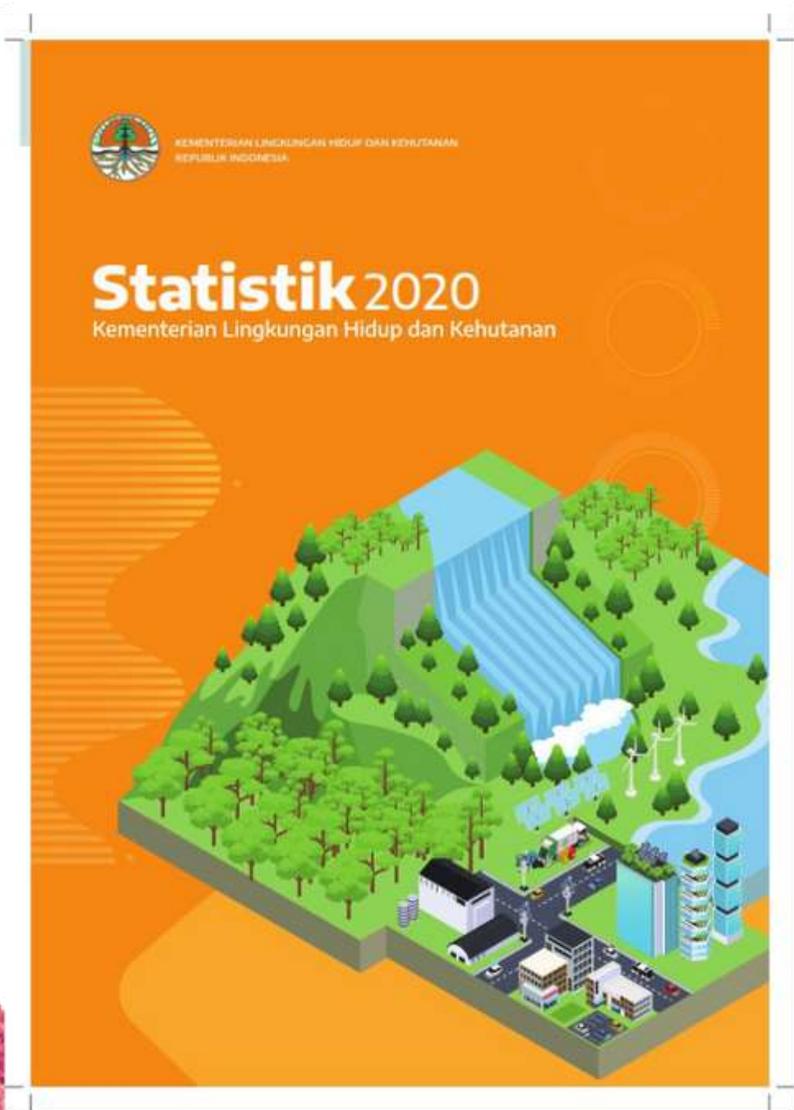
#### Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022

Publikasi Statistik LHK merupakan salah satu proses menyampaikan hasil statistik kepada masyarakat dan para pihak melalui media yang terbuka. Publikasi Statistik LHK dapat digunakan untuk membantu pemerintahan dalam membuat keputusan strategis dan perencanaan, serta .....

Pentingnya publikasi Statistik LHK dapat menjamin transparansi dalam melapor kepada masyarakat tentang aktivitasnya. Informasi statistik dapat digunakan untuk menjamin tingkat kepercayaan masyarakat dan para stakeholder terkait terhadap pemerintahan, serta dapat menjamin akuntabilitas dalam salah satu media pelaporan kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran dan sumber daya LHK.

Buku Statistik KLHK 2022 disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta meningkatkan nilai manfaat informasi publik khususnya data bidang pembangunan LHK. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Buku Statistik ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK.SETJEN.KUM.1/6/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Buku Statistik ini menyajikan beragam data statistik 13 eselon 1 LHK dengan rentan data sampai dengan tahun 2022.

Buku Statistik KLHK 2022 disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, serta meningkatkan nilai manfaat informasi publik khususnya data bidang pembangunan LHK. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Buku Statistik ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK.SETJEN.KUM.1/6/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Buku Statistik ini menyajikan beragam data statistik 13 eselon 1 LHK dengan rentan dara sampai dengan tahun 2022.



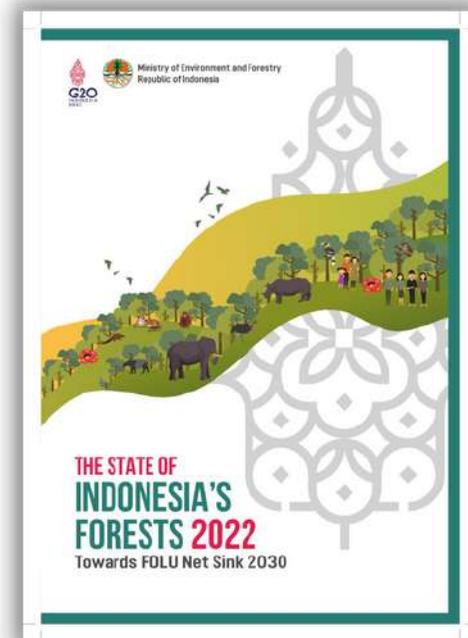
## **SOIFO (The State of Indonesia's Forest)**

Pada tahun 2020 dan 2022 yang merupakan dokumentasi kebijakan pemerintah mengelola hutan dan lingkungan selama 2018–2022. Peluncuran SOIFO 2022 dilakukan disela sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di kantor pusat FAO, Roma, Italia, Selasa, 4 Oktober 2022. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pembahasan Indonesia's Plans for Carbon-positive Forests by 2030.

Publikasi SOIFo atau Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2022 merupakan pembaruan dari Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020. SOIFo 2022 menyoroti pencapaian dan kemajuan terbaru Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dalam mengelola hutan Indonesia secara lestari dan mengatasi dampak perubahan iklim global. Dokumen ini disusun oleh tim penulis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyajikan data dan informasi terkini mengenai pengelolaan hutan tropis Indonesia, dan memberikan gambaran kemajuan yang telah dicapai sampai saat ini.

Melalui Buku SOIFO 2022 ini, KLHK berbagi ide yang sama dengan SOFO 2022, dalam konteks Indonesia. SOIFO 2022 merupakan dokumentasi kehutanan dunia yg dipublikasikan FAO.

Discussion yang pertama pada tanggal 12–13 September di Kantor P3E di Bali yang dibuka oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dihadiri oleh Tim Editor dan seluruh Kontributor Data Buku SOIFO. Direncanakan Buku SOIFO 2024 akan terbit pada Bulan Juni 2024.



Pada tahun 2018, sejalan dengan diterbitkannya “The State of the World’s Forests 2018” oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Indonesia

menerbitkan laporan dua tahunan pertamanya yang berjudul “Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia 2018” yang menunjukkan perhatian serius pemerintah untuk menjaga hutan tropis Indonesia. Edisi pertama dari publikasi ini kemudian diperbarui pada tahun 2020 melalui penerbitan “Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020” yang mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk berkomunikasi dengan masyarakat global tentang bagaimana hutan Indonesia dikelola, tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk kontribusi global.

Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2022 menyoroti pentingnya peran hutan tropis Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim global. Sebagaimana dinyatakan dalam NDC, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29 persen terhadap skenario business- as-usual (BAU) melalui upaya sendiri (tanpa syarat) dan hingga 41 persen dengan bantuan internasional yang diperlukan (bersyarat), pada tahun 2030, untuk mengurangi risiko terkait perubahan iklim. Dari 29 persen target tanpa syarat, 17,2 persen akan dicapai melalui sektor kehutanan.

Dokumen Enhance NDC dengan target yang lebih ambisius telah diserahkan ke UNFCCC. Dalam dokumen tersebut, target pengurangan emisi tanpa syarat meningkat dari 29 persen menjadi 31,89 persen, dan target bersyarat dengan bantuan internasional meningkat dari 41 persen menjadi 43,20 persen. Penyempurnaan NDC ini merupakan transisi menuju NDC Kedua Indonesia yang akan diselaraskan dengan Strategi Jangka Panjang Indonesia untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS- LCCR) 2050 dengan visi untuk mencapai emisi net-zero. Selain itu, Enhance NDC juga mencerminkan konteks nasional saat ini dimana tonggak yang ditetapkan telah sejalan dengan Pembangunan Nasional periode 2020-2024.

## **STATUS** **HUTAN &** **KEHUTANAN** **INDONESIA 2022** **Menuju FOLU Net Sink 2030**

## **SLHI (Status Lingkungan Hidup Indonesia)**

Dalam rangka menyediakan dokumentasi berupa data dan informasi tentang lingkungan hidup dalam satu tahun, yang selanjutnya dipakai untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pendidikan dan peningkatan peran publik perlu disusun suatu laporan Status Lingkungan Hidup. Laporan Status Lingkungan Hidup (SLH) memberikan gambaran umum mengenai kondisi biogeofisik dan sosio-ekonomik serta bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap kelestarian lingkungan hidup dan implikasinya terhadap perekonomian dan kesehatan manusia. Selain itu, laporan Status Lingkungan Hidup juga akan memberikan gambaran tentang hasil dari suatu upaya atau respon, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, terhadap perbaikan kondisi lingkungan hidup. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi "Earth Summit " tahun 1992 mengamanatkan agar setiap negara melaporkan status kondisi lingkungannya secara berkala.

Untuk memenuhi amanat tersebut dan memenuhi kewajiban UU No. 23 tahun 1997 pasal 10, huruf h, yaitu dalam rangka akuntabilitas publik perlu disusun Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia, dan sampai saat ini sudah lima Laporan yang diterbitkan yaitu SLHI mulai tahun 2002. Untuk SLHI 2018 publikasi laporan tersebut akan disampaikan dalam bentuk buku yang berbahasa Indonesia. Pentingnya pelaporan Status Lingkungan Hidup Indonesia sebagai bagian dari akuntabilitas publik juga merupakan upaya dalam melaksanakan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

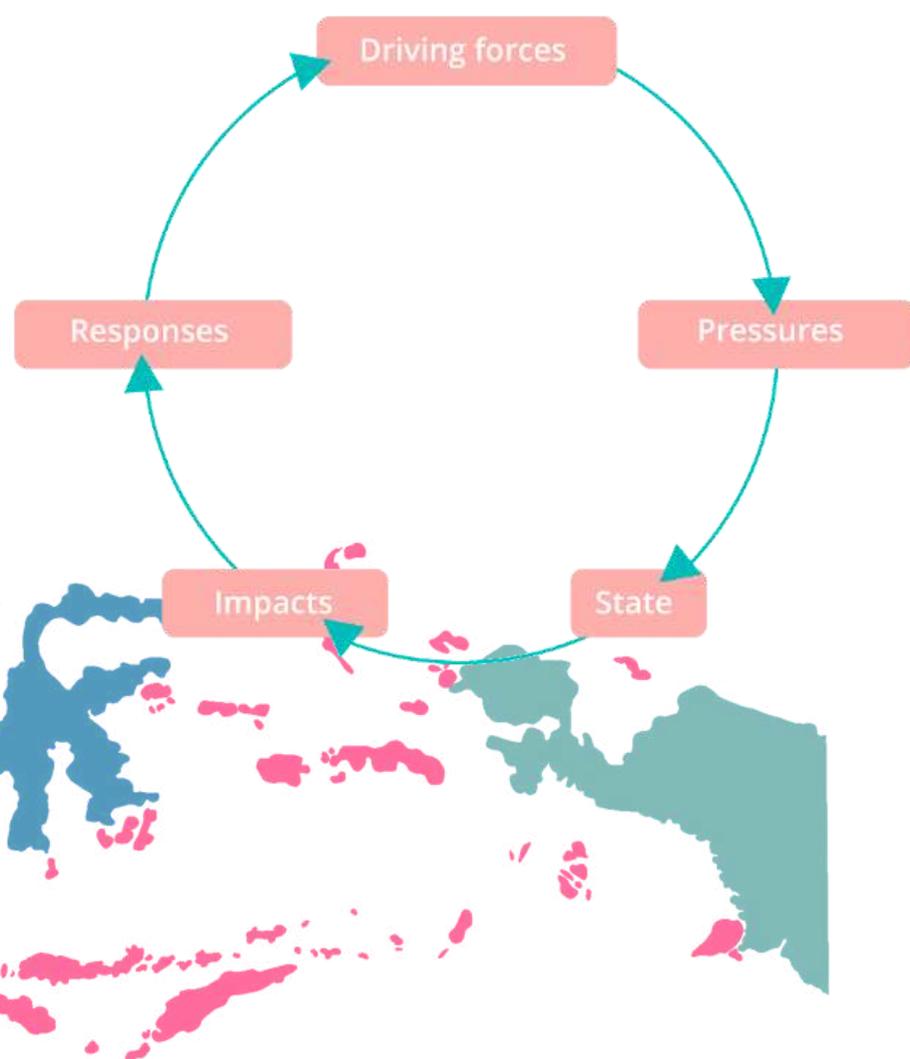
Laporan SLHI merupakan bagian dari proses besar yang ditujukan untuk mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan melalui penyediaan informasi yang akurat. Diharapkan kedepan dengan data dan komunikasi informasi yang lebih baik, laporan ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.



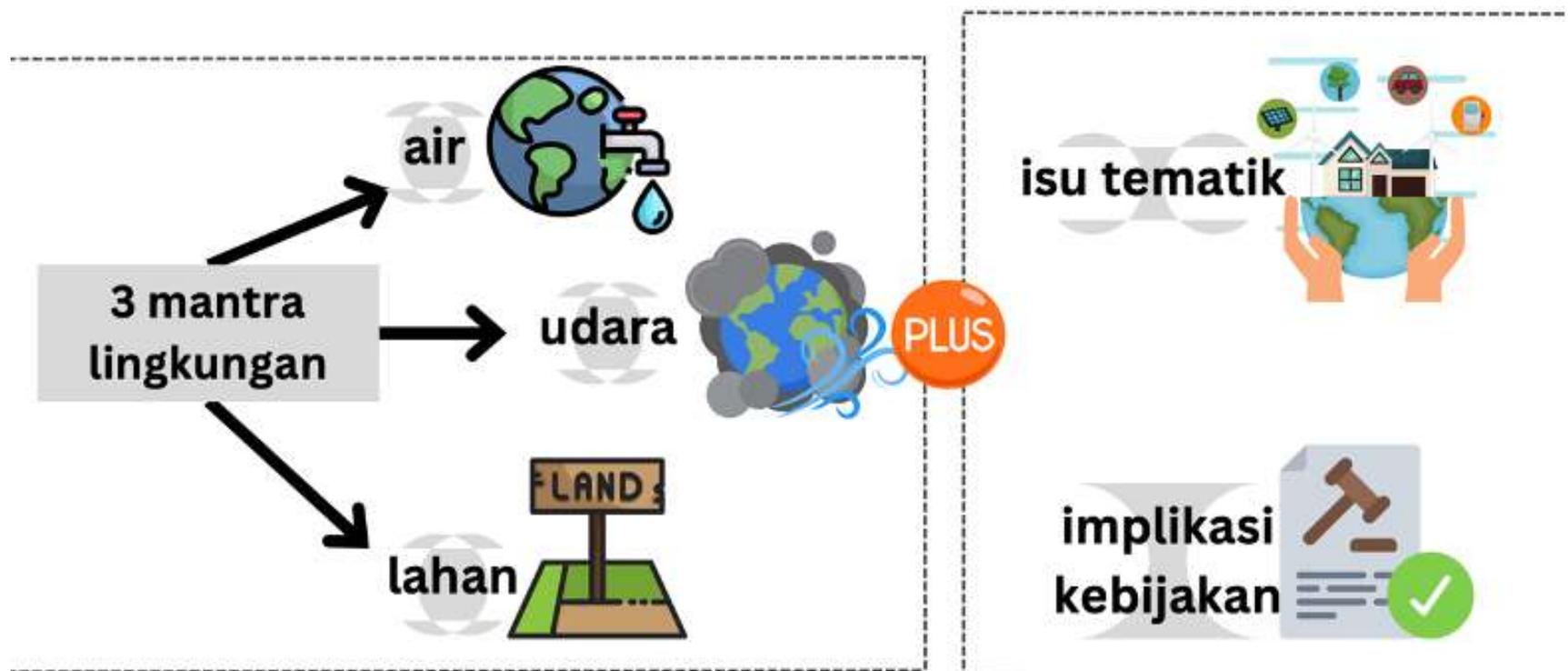
Untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dibutuhkan dukungan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kontribusi dari masyarakat, program-program yang telah direncanakan dapat tercapai secara maksimal. Sebagai bentuk dukungan untuk hal tersebut, diperlukan informasi mengenai kondisi lingkungan yang terjadi dari seluruh wilayah Indonesia. Informasi terkait lingkungan harus mudah diakses dan dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun buku Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2023 sebagai kumpulan informasi kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar acuan semua pihak untuk menilai, meneliti dan menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Buku ini akan menampilkan status lingkungan Indonesia yang terbagi menjadi 6 ekoregion (Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi-Maluku, dan Papua).

Masing-masing ekoregion dibahas profil, isu lingkungan prioritas, dan pembahasan rinci dari setiap isu prioritas terpilih. Metode/konsep yang digunakan untuk membahas isu lingkungan secara terstruktur dan menyeluruh, yaitu dengan konsep Driving force, Pressure, State, Impact, dan Response (DPSIR). Selain membahas isu lingkungan yang terjadi di setiap ekoregion, buku ini juga membahas isu lingkungan terkait pengelolaan kualitas air yang merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi salah satu isu lingkungan global.



Metode DPSIR menggambarkan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, metode ini relevan untuk membahas hubungan sebab akibat terkait dengan isu lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, pengambil kebijakan dapat mengikuti informasi terkait dengan permasalahan lingkungan yang kompleks melalui hubungan sebab-akibat dan menyelesaikan permasalahan lingkungan secara sistematis. Overview kondisi lingkungan Indonesia juga dilakukan dengan memberikan informasi lingkungan Indonesia berdasarkan 3 (tiga) mata utama, yakni lahan, air, dan udara.



Hasil analisis capaian kinerja penyusunan naskah SLHI 2023 dengan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu akan menjadi acuan dalam menentukan strategi meningkatkan penyusunan naskah SLHI dalam tahun bertahap. Pada penyusunan dokumen naskah SLHI 2023 pelibatangannya tidak hanya K/L tetapi juga dengan Dinas KLHK dan Non KLHK.



Dokumen naskah SLHI Tahun 2023 mengangkat tema pengelolaan sampah di Indonesia, KLHK telah melakukan berbagai upaya mengatasi persoalan sampah khususnya di daerah. Dengan memanfaatkan kembali sampah sebagai alternatif bahan baku ataupun didaur ulang yang dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan (circular economy) dari upaya pengelolaan sampah tersebut.

Akar permasalahan sampah di Indonesia dapat bersumber dari berbagai hal seperti kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran. Dibalik permasalahan-permasalahan tersebut kebijakan pengelolaan sampah di beberapa daerah sudah cukup progresif. Seluruh pengelolaan sampah yang berhasil di Indonesia selalu berawal dari kebingungan pemerintah daerah dalam menangani sampah wilayahnya.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan SLHI adalah data kolaborasi dari multipihak, Eselon 1 terkait sebagai pengelola substansi merupakan data primer yang digunakan, melalui kunjungan langsung dilapangan juga digunakan sebagai verifikasi data dan informasi yang didapatkan dalam menyusun naskah SLHI.

Penyusunan naskah SLHI juga melibatkan data dari instansi lain terkait, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan salah satu sumber data pendukung yang digunakan dalam penyusunan SLHI, utamanya data terkait informasi isu prioritas pengelolaan lingkungan di tiap-tiap provinsi seluruh Indonesia. Pada tiap tahunnya daerah dengan pengelolaan lingkungan hidup terbaik melalui pengiriman DIKPLHD akan akan mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra



## D. Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan data dan sistem informasi, Pusat Data dan Informasi melakukan kegiatan survey tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proses survey mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan pengguna layanan dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai tingkat kepuasan layanan umum satker Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh melalui proses survey secara *hybrid* yang bersifat *voluntary*. Selama tahun 2023 survei ini diikuti oleh 208 orang responden yang merupakan PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan masyarakat umum.

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yaitu : Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian/Kewajaran Biaya, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Kualitas Sarana dan Prasarana

Hasil survey ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan sangat baik dapat dipertahankan. Dengan tercapainya nilai pelayanan sangat baik, maka harapan dan tuntutan pengguna layanan atas hak-hak mereka dapat tercapai.



No	Unsur Pelayanan	Nilai %	Keterangan
1	2	3	4
1	Kesesuaian Persyaratan	100%	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	100%	Sangat Baik
3	Kecepatan Layanan	100%	Sangat Baik
4	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	100%	Sangat Baik
5	Kesesuaian Pelayanan	100%	Sangat Baik
6	Kompetensi Petugas	100%	Sangat Baik
7	Perilaku Petugas Pelayanan	100%	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan	100%	Sangat Baik
9	Kualitas Sarana dan Prasarana	100%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil survey kepuasan layanan data dan sistem informasi pada tahun 2023, dapat diketahui bahwa nilai akhir dari keseluruhan menunjukkan angka 100%, dimana angka tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan Pusat Data dan Informasi dalam pelayanan data dan sistem informasi, tidak lepas dari program-program yang dilakukan selama tahun 2023, baik dari bidang Pengelolaan Data dan Informasi, maupun Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi yang selalu memperhatikan aspek pelayanan dan berorientasi pada kebutuhan pengguna data dan sistem informasi.

Pelayanan data dan informasi pada tahun 2023 mencakup segmen internal maupun eksternal, pengelolaan data lingkungan hidup dan kehutanan yang dikelola melalui berbagai program seperti statistik maupun data prioritas, sejauh ini diterima dengan baik oleh pengguna data. Informasi yang tersaji dalam berbagai media publikasi sampai dengan pelayanan museum dan perpustakaan mendapatkan tanggapan positif dari pengguna layanan. Dari bidang pengelolaan teknologi informasi, layanan jaringan internet, sampai dengan sistem informasi khususnya untuk kalangan internal KLHK menunjukkan respon yang sangat baik.

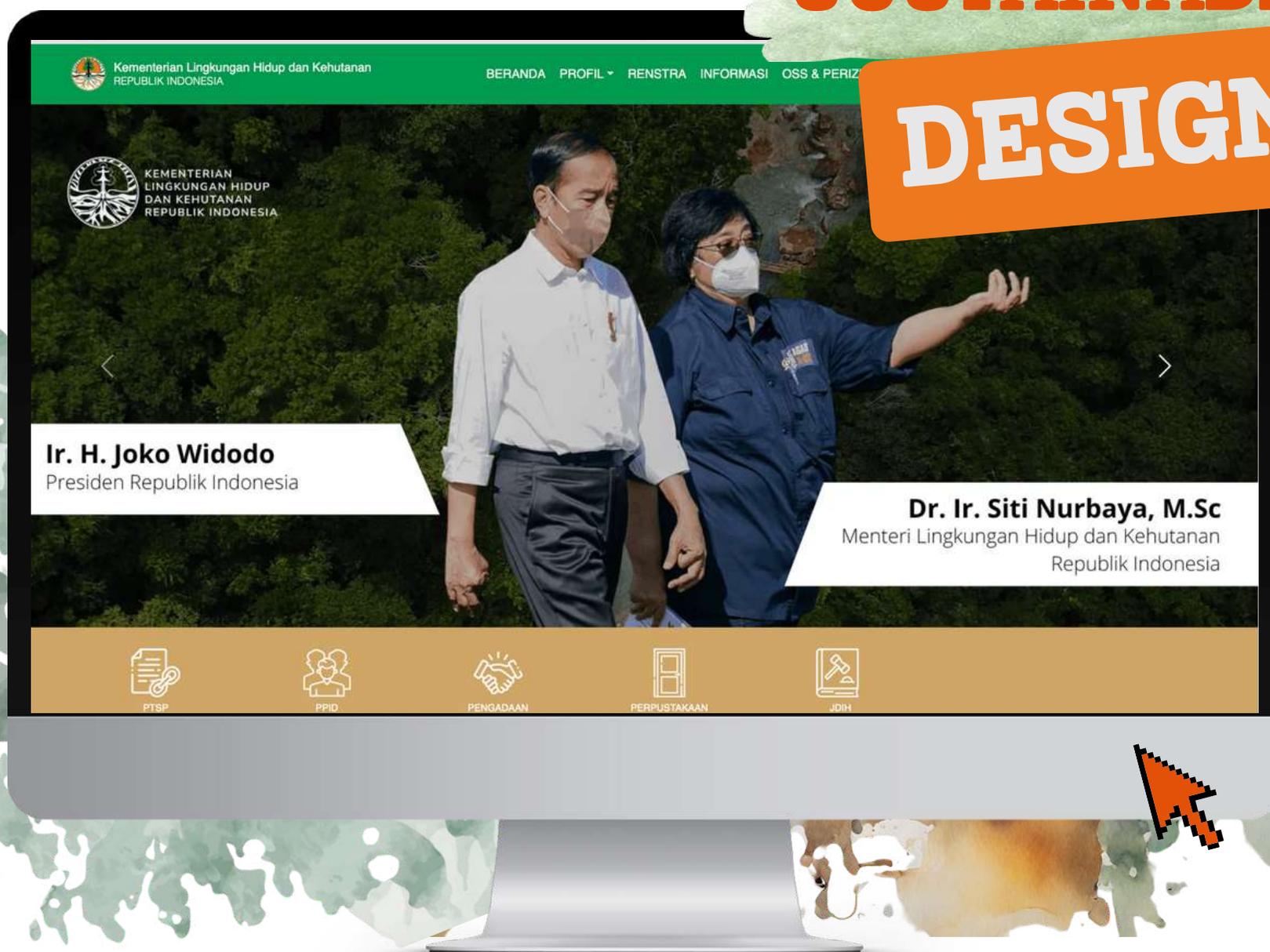


www.menlhk.go.id



**SUSTAINABLE**

**DESIGN!**



**NEW**

**WEBSITE**

**LAUNCH !!!**

## E. Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Berdasarkan referensi terkini, istilah e-Government sebelumnya mulai digantikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau (SPBE) yang diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Seiring dengan telah dirilisnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dirilisnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar urgensi perlunya implementasi SPBE yang memadai.

Salah satu indikator SPBE adalah perlunya kebijakan internal yang berisi strategi pemerintahan berbasis elektronik, rancang bangun proses, sistem dan infrastrukturnya, beserta rencana implementasinya, sebagai referensi pembangunan TIK di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kurun waktu tahun 2021-2025. Berkenaan dengan hal tersebut di atas melalui pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPBE ditahun 2023 telah dihasilkan beberapa keluaran sebagai berikut :

1. Blueprint SPBE yang didalamnya mencakup peta rencana, aritektur, tata kelola dan manajemen SPBE.
2. Keputusan Menteri Nomor. 694/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tentang penyelenggaraan SPBE Lingkup KemenLHK
3. SK Sekjen Nomor 71/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekjen KemenLHK Nomor SK. 43/SETJEN/ROKUM/DTN.2/7/2022 tentang Tim Koordinasi SPBE lingkup KLHK



# Capaian Indeks SPBE

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) turut berpartisipasi aktif dalam pencapaian sasaran guna terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Dalam mendukung hal tersebut Pusat Data dan Informasi yang mempunyai tugas dalampenyelenggaraan data dan informasi KLHK melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berusaha memenuhi target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini tertuang dalam sasaran yang haru dicapai yaitu meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK melalui salah satu indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target 3,65.

## Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian terhadap target Perjanjian Kinerja 2023 sebesar 3,65 poin

99,18%

Capaian terhadap target Renstra 2020-2024 sebesar 3,7 poin

97,84%

Capaian 2023

3,62 POIN

Berdasarkan proses penilaian dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi dari Kementerian PANRB. Nilai Indeks SPBE KLHK Tahun 2023 ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui Keputusan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 memperoleh nilai indeks sebesar 3.62 atau predikat "sangat baik". Capaian Indeks SPBE dengan persentase capaian sebesar 99,18 terhadap perjanjian kinerja tahun 2023.

Capaian Indeks SPBE KLHK Tahun 2023 ini meningkat signifikan sebesar 0,89 jika dibandingkan capaian nilai indeks SPBE Tahun 2022 yang sebesar 2,73 atau predikat "baik".

Indeks SPBE yang ditetapkan dalam Renstra di Tahun 2023 sebesar 3,65 poin dan pada Tahun 2024 sebesar 3,70 poin. Capaian Indeks SPBE Tahun 2023 yang memperoleh nilai sebesar 3,62 poin ini merupakan persentase capaian sebesar 99,18% terhadap target Renstra Tahun 2023 dan 97,84% terhadap target Renstra Tahun 2024. Upaya pencapaian target Renstra Tahun 2024 sudah dipersiapkan melalui rencana strategi perbaikan kinerja Indeks SPBE KLHK.



# ALI 2023

ANUGERAH LAYANAN INVESTASI

Merjaya Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Jakarta, 8 November 2023



Nilai Indeks SPBE Tahun 2023 ini merupakan capaian nilai Indeks SPBE tertinggi yang diperoleh KLHK dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun terakhir sejak Tahun 2018. Adanya penurunan nilai Indeks SPBE KLHK pada Tahun 2021 yang disebabkan oleh adanya perubahan peraturan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 menjadi PermenPANRB No.59 Tahun 2020 yang merubah instrument dan aspek penilaian, menjadikan titik balik dalam evaluasi penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh pada setiap aspek penilaian Indeks SPBE di KLHK pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan nilai sebesar 0,11 poin pada Tahun 2022, menjadi sebuah penyemangat KLHK untuk terus meningkatkan nilai Indeks SPBE yang pada akhirnya pada Tahun 2023 ini berhasil memperoleh nilai sebesar 3,62 dengan predikat "Sangat Baik" dan meningkat signifikan sebesar 0,89 jika dibandingkan capaian nilai indeks SPBE Tahun 2022 yang sebesar 2,73 atau predikat "Baik".



### Indikator Capaian

**KURANG : < 1,8**   **CUKUP : 1,8 - < 2,6**   **BAIK : 2,6 - < 3,5**   **SANGAT BAIK: 3,5- < 4,2**   **MEMUASKAN : 4,2- < 5,0**

# Branchmarking

Berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, KLHK memperoleh hasil penilaian Indeks SPBE sebesar 3,62 poin dengan predikat "Sangat Baik" dan meningkat signifikan sebesar 0,89 jika dibandingkan capaian nilai indeks SPBE Tahun 2022 yang sebesar 2,73 atau predikat "baik". Hasil ini membuat KLHK naik dari peringkat 29 di Tahun 2022 menjadi peringkat 17 di Tahun 2023 serta peringkat ke 7 untuk kategori Kementerian yang meningkat secara signifikan. Untuk Kementerian/Lembaga (K/L) didalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, pada Tahun 2022 KLHK merupakan K/L yang menempati posisi paling bawah dari 7 K/L dalam capaian Indeks SPBE. Namun pada Tahun 2023 ini, KLHK berhasil menempati posisi 4 untuk capaian nilai dan peringkat 2 untuk K/L yang mengalami peningkatan secara signifikan dari 7 K/L lainnya.

Capaian Indeks SPBE lingkup Koordinasi Kemenko Marves			
Instansi	Nilai SPBE 2022	Nilai SPBE 2023	Peningkatan
Kementerian Parekraf	3,42	4,67	1,25
Kementerian LHK	2,73	3,62	0,89
Kementerian PUPR	3,17	3,81	0,64
Kementerian Perhubungan	3,33	3,71	0,38
Kementerian KP	3,3	3,58	0,28
BKPM	2,8	2,83	0,03
Kementerian ESDM	3,51	3,52	0,01

# Capaian Lain Terkait SPBE



## H. Realisasi Anggaran

**Pagu Anggaran**  
**19.105.999.000**

**Realisasi Anggaran**  
**19.097.509.529**

**99,96%**

Total pagu anggaran pada Pusat Data dan Informasi Tahun Anggaran 2023 adalah Rp19.105.999.000.--. Pagu tersebut seluruhnya terdiri dari dana Rupiah Murni (RM). Berdasarkan data OMSPAN, realisasi anggaran tahun 2023 Pusat Data dan Informasi sebesar Rp19.097.509.529,- atau 99,96% dari pagu anggaran tahun 2023 dengan rincian Realisasi Layanan Data dan Informasi sebesar Rp5.376.204.546; Sarana Informasi KLHK Rp10.352.297.064; Layanan Perkantoran Rp3.043.368.719; dan Sarpras Internal Rp324.960.200.

Pada tahun 2023, Pusat Data dan Informasi memiliki pagu Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp1.478.430.000 dari pagu awal sebesar Rp20.584.429.000.

# NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	182	029	465005	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Nilai	100.00	59.02	85.65	97.00	100.00	92.56	100.00	100.00	91.99	100%	91.99
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.90	17.13	9.70	10.00	9.26	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	79.51		95.04					100.00			

Perolehan Nilai IKPA di atas merupakan nilai IKPA Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal KLHK dengan perolehan nilai 91,99 dan termasuk dalam kategori B. Namun terdapat komponen yang memiliki nilai kurang memuaskan yaitu Deviasi Halaman III DIPA, hal tersebut diakibatkan oleh tidak samanya realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan. Disamping itu, Nilai EKA pada unit kerja Pusat Data dan Informasi yaitu sebesar 84,64 poin.

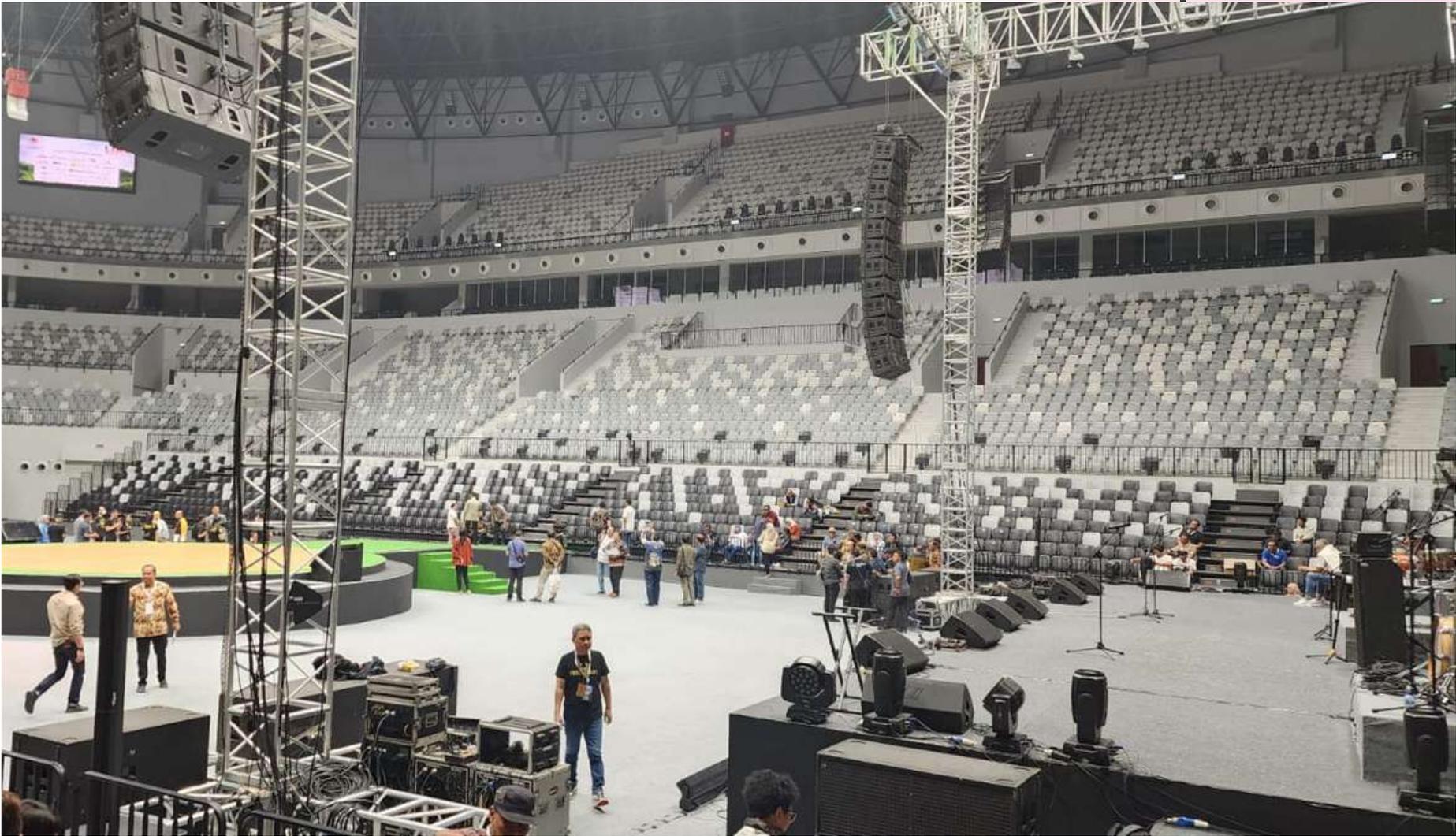
Nilai IKPA dan Nilai EKA akan dipakai untuk menghitung Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan menghitung Nilai IKPA ditambah dengan Nilai EKA dikali 50%. sehingga didapatkan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi sebesar :

$$\text{NKA} : (50\% \text{ Nilai IKPA}) + (50\% \text{ Nilai EKA})$$

$$\text{NKA} : (50\% \times 91,99) + (50\% \times 84,64)$$

$$\text{NKA} : 45,99 + 42,32$$

$$\text{NKA} : 88,31$$



# INFOGRAFIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PUSDATIN 2020, 2021, 2022, 2023

2020 2021 2022 2023

DATA DAN  
INFORMASI  
KLHK

TARGET

4

3

3

3

CAPAIAN

4

3

3

3

TINGKAT  
KEPUASAN  
LAYANAN  
DATA

TARGET

4

4

4

4

CAPAIAN

4

4

4,17

4

NILAI INDEKS  
SPBE

TARGET

3,5

3,5

3,5

3,65

CAPAIAN

3,5

2,6

2,73

3,62

# PERJANJIAN KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2023

---



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. EDI SULISTYO H. SUSETYO, S.Hut., M.Si.

Jabatan : KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M

Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar-benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M  
NIP. 19640930 198903 1 001



Dr. EDI SULISTYO H. SUSETYO, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19701206 200003 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI  
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

<b>Kegiatan (1)</b>	<b>Sasaran Kegiatan (2)</b>	<b>Indikator Kegiatan (3)</b>	<b>Target (4)</b>	<b>Satuan (5)</b>
5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK	01-Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian	01-Data dan Informasi KLHK (Statistik, SLHI, Status Hutan)	3	Dokumen
		02-Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi KLHK	4	poin
		03-Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,65	Poin

Klasifikasi Riincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

Pagu Anggaran

EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963- Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	5.377.317
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994- Layanan Perkantoran	1 Layanan	3.050.000
EBB – Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Unit	610.900
FAB – Sistem Informasi Pemerintahan	001- Sistem Informasi KLHK dan <i>Command Center</i>	1 Sistem Informasi	10.353.682

Sekretaris Jenderal

Dr.Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M  
NIP. 19640930 198903 1 001

Jakarta, Desember 2023

Kepala Pusat Data dan Informasi



Dr. IRI SULISTYO H. SUSETYO, S.Hut., M.Si  
NIP. 19701206 200003 1 004

# CAPAIAN KINERJA

Pusat Data dan Informasi  
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi kementerian

**3**<sub>/3</sub>

Data dan Informasi KLHK

**4**<sub>/4</sub>

Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Informasi KLHK

**3,62**<sub>/3,65</sub>

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)





Berdasarkan hasil pengukuran indikator-indikator kinerja Pusat Data dan Informasi, masing-masing indikator kinerja dapat tercapai 100%, yaitu Data dan Informasi KLHK (IKLH, SLHI, Statistik, SLHI), Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK, Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Jumlah Pengunjung Website KLHK.

Dari aspek pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran Pusat data dan informasi tahun 2023 adalah sebesar 99,96%, sedangkan dari aspek kinerja mencapai angka 100%. Apabila disandingkan antara capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja Pusat data dan informasi maka terdapat rasio 0,99:1 yang berarti penggunaan anggaran pada Pusat data dan informasi sangat efisien terhadap capaian kerjanya.

Pencapaian Pusat Data dan Informasi sejauh ini tidak lepas dari keberhasilan tiap-tiap program kerja dalam melaksanakan kegiatan, perbaikan dari tiap evaluasi menjadikan Pusdatin yang lebih baik. Pusat Data dan Informasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peran strategis sebagai pengelola data, pengelola informasi, pelayanan jaringan, pelayanan sistem informasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam keberhasilan Pusat Data dan Informasi pada tahun 2023, Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan menjadi acuan untuk melaksanakan program di tahun 2024.

